

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH BANK BRI  
MELALUI KREDIT (KUR) PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN  
DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA**

**MONALISA S. NAJOAN  
JOYCE J. RARES  
ALDEN LALOMA**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha oleh Bank BRI Melalui Kredit (KUR) pada Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam pelaksanaan program KUR oleh Bank BRI Capem dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis turun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan Wawancara jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang

Hasil Penelitian menunjukkan Sasaran program KUR melalui penyediaan modal usaha oleh pemerintah yang disalurkan melalui Bank BRI. di Kecamatan Kawangkoan sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Dana KUR yang diterima oleh kreditur melalui bank BRI dapat dikatakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan para pelaku usaha rumah makan. Penetapan angsuran yang tinggi oleh Bank BRI menjadi keluhan para kreditur karena mereka merasa terbebani apalagi dimasa pandemi Covid-19. Prosedur pemberian kredit KUR yang dilakukan oleh Bank BRI tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada atau dengan kata lain ada prosedur tertentu yang dilewati sehingga kreditur yang semestinya tidak layak mendapatkan kredit KUR tersebut tapi kenyataannya mereka menerima.

**Kata Kunci : Efektivitas, KUR, UMKM**

**Abstract**

*The purpose of this study was to find out how the Effectiveness of the Business Capital Loan Assistance Program by Bank BRI through People 's Business Credit (PBC) for Restaurant Business Actors in Kawangkoan District, Minahasa Regency.*

*This study uses a descriptive qualitative approach, which is a method that aims to explain or describe problems in a systematic, factual and accurate manner regarding the facts and characteristics of a particular population or area. Qualitative research is research that is used to examine and understand the phenomena experienced by research subjects in the implementation of the KUR program by Bank BRI by means of descriptions in the form of words and language in a special natural context and by utilizing various scientific methods. In terms of collecting this data, the authors went directly to the object of research to obtain data, the researchers used data collection techniques through observation and interviews. The number of informants in this study amounted to 10 people.*

*The results show that the target of the KUR program is through the provision of business capital by the government which is channeled through Bank BRI. in Kawangkoan District has been running well according to applicable regulations and right on target. KUR funds received by creditors through BRI bank can be said to be inappropriate or not in accordance with the total needs of restaurant business actors. The determination of high installments by Bank BRI has become a complaint for creditors because they feel burdened, especially during the Covid-19 pandemic. The procedure for granting KUR credits carried out by Bank BRI is not carried out according to existing procedures or in other words there are certain procedures that are passed so that creditors who should not be eligible to get KUR credit but in fact they receive.*

**Keywords: Effectiveness, PBC, Small and Medium Enterprises**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menimbulkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana dan lain-lain. Sementara pasal 2 menyatakan " Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menimbulkan iklim usaha." Dari peraturan perundang-undangan diatas menunjukan bahwa dunia usaha seperti bank, harus berperan aktif dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM.

UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti ketika krisis melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 UMKM yang pada masa itu masih disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena mampu memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Ravik, 2007). Mengingat UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMK diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional (Widyaresti, 2012). UMKM mampu menyerap 99,45 persen dari total tenaga kerja atau 73,74 juta tenaga kerja (Marimbo, 2008).

Fungsi dan peranan UMKM dirasakan begitu penting, karena sektor ini bukan hanya sebagai mata pencaharian bagi orang banyak, tetapi menyediakan lapangan pekerjaan secara langsung bagi mereka yang berpendidikan dan berketerampilan rendah. Hyland *et al* (2000) mengemukakan bahwa usaha kecil kebanyakan tidak memiliki strategi atau kekurangan ahli strategi. Hal ini yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Kinerja UMKM

dipengaruhi oleh dua faktor utama dan mendasar yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), aspek keuangan, aspek teknis produksi dan aspek pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga sosial masyarakat (LSM) (McCormick *et.al*,1997), selain itu lingkungan bisnis eksternal memiliki dampak pada kinerja organisasi (Adeoye, Abayomi Olarewaju dan Elegunde, Ayobami Folarin, 2012). Hafsan, 2008:8 (dalam Amran Husen, 2012), oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan dan memperluas UMKM dalam perekonomian nasional diperlukan serangkaian pembinaan yang bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi, dan permodalan.

Kondisi dan fakta di atas sejalan dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan Emirbagetal (2006), dalam Amran Husen (2012) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan UMKM memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada negara maju maupun negara sedang berkembang. UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan biaya minimum. Mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi strategi bisnis dan pertumbuhan usaha (Amran Husen, 2012).

Rothwel dan Zegveld (1982) menguraikan beberapa kebijakan umum yang mendukung UMKM, diantaranya adalah :

- (1) distribusi dari kekuatan pasar lewat sebuah sistem dari UMKM membuat suatu distribusi dari kekuatan pasar yang lebih baik dalam masyarakat secara umum,
- (2) suatu tingkat konsentrasi pasar yang tinggi mengakibatkan ekonomi tidak efisien,

- (3)UMKM berfungsi sebagai suatu peredam terhadap guncangan kesempatan kerja, misalnya pada saat krisis ekonomi 1997/1998 di indonesia,
- (4)UMKM menghasilkan produk-produk yang lebih bervariasi yang bisa memenuhi selera individu masyarakat.

Melihat berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi oleh UMKM, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjamin dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ini. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia ( Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank pelaksana.

Menurut Semara Putra (2013), KUR yang merupakan salah satuupaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi Pemberian. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah: (1) mempercepat

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), (2) meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan, (3) sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Penilaian efektivitas dalam penyaluran kredit usaha rakyat dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil dapat diukur menggunakan lima aspek, yaitu aspek ketepatan sasaran program, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur. Faktor-faktor produksi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan perkembangannya, UMKM telah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bahkan sebagai tiang ekonomi dan juga sebagai pejuang ekonomi rakyat, terutama dalam aspek dalam peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pembangunan pedesaan dan ekspor nonmigas. Selain itu UMKM juga mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan dalam negara, dan juga sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya UMKM meski dihadapi dengan masalah klasik, yakni masalah pada permodalan, iklim usaha, manajemen sumber daya manusia, produksi, financial, birokrasi/perizinan, efesiensi, nilai tambah dan informasi peluang bisnis, Permasalahan utamanya yaitu berkaitan dengan kesulitan dalam hal permodalan dan pemasaran. Modal merupakan faktor yang penting dalam suatu produksi, yang artinya modal akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu usaha, ketika modal yang digunakan sedikit maka produk yang dihasilkan juga sedikit begitu pula jika modal yang digunakan besar maka tidak akan menutup kemungkinan jumlah produk yang dihasilkan juga besar.

Efektivitas suatu program diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu program

untuk mewujudkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, begitu pula dengan efektivitas KUR, efektivitas program KUR bisa dilihat dari besarnya alokasi penyaluran kredit dan sangat tergantung pada distribusi pengalokasiannya, baik menurut sector ekonomi maupun penerimanya (pelaku ekonominya). Oleh karena itu distribusi pengalokasian penyaluran KUR juga menjadi masalah krusial dalam upaya optimalisasi dampak positif dan efektivitas program KUR.

Program KUR merupakan program khusus, dimana perbankan hanya akan menyalurkan kredit selama pemerintah berkomitmen dalam melakukan penjaminan atas kredit. Oleh karena itu, peningkatan dari sisi penawaran sangat tergantung besaran jaminan di perusahaan penjamin. Dalam upaya peningkatan besarnya jaminan di perusahaan penjamin untuk program KUR tentunya pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai hal karena alokasinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap jenis alokasi dalam APBN secara mendasar merupakan perhatian dan prioritas bagi pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan besaran jaminan di perusahaan penjamin untuk KUR mestilah jadi prioritas dalam mengelola anggaran, sehingga KUR ini mampu bisa mencapai tujuan-tujuannya.

Sebagaimana peranan KUR sebagai upaya pemerintah untuk memberdayakan UKM dengan memberi kemudahan dalam pemberian pinjaman. KUR ini merupakan program pemerintah yang melibatkan APBN Negara, dengan hal tersebut sudah barang tentu perlu dibuktikan efektivitasnya secara empiris dan mendalam. Selain dampaknya positif, KUR perlu dibuktikan apakah benar-benar mampu secara efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menggerakkan/mengembangkan/memperluas UKM, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran.

Usaha rumah makan di Kawangkoan saat ini dapat dikatakan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan bagi pengusaha

kuliner untuk dapat mengembangkan usahanya karena dilihat dari jumlah pelanggan disetiap rumah makan, rumah kopi khususnya di Kawangkoan cukup banyak bahkan setiap harinya meningkat hal ini dapat dilihat dari jumlah kursi yang tersedia disetiap rumah makan, rumah kopi semua terisi penuh dan sesuai hasil pengamatan penulis disalah satu rumah makan bahwa ternyata pelanggan yang ada bukan hanya masyarakat yang ada disekitar wilayah kawangkoan akan tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari luar wilayah kawangkoan yaitu ada yang datang dari Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Selatan bahkan ada pengunjung yang datang dari luar Provinsi Sulawesi Utara seperti dari Jakarta, Jawa, Kalimantan, Sumatera bahkan ada turis asing yang datang hanya sekedar menikmati kuliner khas Minahasa dan hal ini ditunjang oleh posisi Kecamatan Kawangkoan yang merupakan jalur pelintasan kendaraan dari pusat Ibu Kota Provinsi yaitu Manado ke daerah – daerah lainnya seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow yang setiap saat melintasi wilayah tersebut dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setiap melintas di Kecamatan Kawangkoan mereka harus berhenti sejenak sambil menikmati makanan khas Minahasa juga suguhan kopi panas.

Bersama roti panggung dan biapong baru setelah pulang mereka membeli kacang tore yang merupakan ciri khas Kawangkoan untuk dibawa pulang sebagai oleh – oleh. Dengan adanya potensi tersebut menjadikan Kawangkoan dikenal dimana – mana dan dengan demikian maka pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius bagi pengembangan usaha kuliner dikawangkoan dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pengusaha rumah makan dan kopi seperti masalah permodalan, penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan khusus di bidang kuliner, penyediaan informasi peluang bisnis, mempermudah perizinan, menjamin iklim usaha agar tetap kondusif sehingga

masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan aman dan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas dan untuk membuktikan Efektivitas Program Bantuan KUR bagi pelaku usaha rumah makan dan kopi di Kecamatan Kawangkoan maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu : Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha oleh Bank BRI Melalui Kredit (KUR) pada Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu yang disusun oleh Kania Suryaningrum Masje Pangkey Burhanuddin Kiyai dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah) (Suatu Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil. Dan Menengah Kota Manado).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati pelaksanaan program pembangunan mikro kecil menengah oleh koperasi, mikro, kecil, dan menengah kota manado. Peningkatan SDM pengusaha mikro, kecil dan menengah juga sangat terbatas. Jadi ini sangat mempengaruhi kinerja dinas koperasi dan mikro kecil menengah manado dengan baik dalam pengambilan data dan pengolahan data. pengembangan usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah tampak terkendala karena minimnya modal dan juga jiwa wirausaha (kewirausahaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program pembangunan mikro, kecil, dan menengah (mikro kecil menengah) (studi di Dinas Koperasi dan mikro kecil menengah manado) dalam ukuran konsep oleh gibson (1984), yaitu produksi, efisiensi, kepuasan pelanggan, adaptasi, dan pengembangan. Dilihat dari kelima aspek tersebut, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan pelanggan, adaptasi, dan pengembangan hampir semua yang dikatakan

belum berjalan dengan baik. Ini semua terbukti karena pemanfaatan sumber daya manusia di Departemen masih minimal. Selain itu dari segi permodalan untuk permodalan di masyarakat diberikan mikro kecil menengah masih sangat minim juga. Dalam pengelolaan modal pinjaman juga sangat sulit dan sangat berbelit belit. Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan di atas maka disarankan. agar Departemen koperasi dan mikro kecil menengah kota Manado dalam efisiensi pelaksanaan pembangunan program usaha mikro kecil menengah hingga menengah kecil harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah dan bukan untuk kepentingan pribadi kelompok atau birokrasi tertentu. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Manado Selengkapnya internal organisasi yaitu membenahi dengan melakukan makeover, melibatkan pelaku mikro kecil menengah agar lebih mau menggunakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Manado sebagai tempat pelatihan dan pembelajaran di istilah kewirausahaan. dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah Anda. dalam urutan untuk dinas koperasi dan mikro kecil menengah kota manado lebih dekat dengan principal usaha kecil menengah dan mikro dapat melaksanakan program secara maksimal. dan dalam hal ini juga diperlukan pentingnya kerjasama tim yang baik dan sesama rekan kerja yang kompak dalam pelaksanaannya tujuan yang ingin dicapai

Penelitian dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur disusun oleh Brayen Bakulu, Masje Pangkey dan Helly Kolondam. Penelitian ini bertujuan untuk program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, agar memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia

disekitar mereka. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari : (1) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 1 Orang (2) Kepala Desa : 1 Orang (3) Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) : 3 orang hasil Penelitian ini PKH Realisasinya masih belum efektif, Program Keluarga Harapan di Desa Hatetabako masih mengalami beberapa kendala, antara lain: kurangnya koordinasi secara langsung dari pihak pendamping PKH terhadap kondisi masyarakat penerima PKH, pencairan dana PKH yang tidak tepat waktu dan dalam pemanfaatan dana bantuan PKH ini oleh keluarga penerima manfaat masih kurang tepat sasaran, rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan. Kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur belum sepenuhnya tercapai dilihat dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

### **Konsep Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2006), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Kemudian menurut Handyaningrat dalam (Lestari & Murti, 2015) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan suatu pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Keberhasilan suatu program tidak hanya mempertimbangkan sasaran organisasi atau instansi akan tetapi juga mekanisme

dalam mempertahankan diri dalam mencapai sasaran. Efektivitas disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.

Atmoesoerapto (2002) menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi dengan bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat.

### **Pengertian Pinjaman Modal Usaha**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, modal adalah sesuatu (uang atau barang) yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk usaha. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap.

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut PP Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu di sertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Jadi dapat diketahui bahwa pinjaman modal usaha adalah suatu barang (uang) atau jasa untuk menjalankan suatu usaha yang wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu

tertentu sesuai kesepakatan antara peminjam dan yang memberi pinjaman.

### **Pengertian KUR**

KUR adalah skema kredit atau pembiayaan model kerja atau investasi yang khususnya diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang diterapkan perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis pemberdayaan usaha Ekonomi Mikro dan Kecil guna meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

Adanya program KUR berarti pemerintah melalui berbagai bank-bank nasional diharapkan ada pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

{sumber:<http://bappeda.kulonprogokab.go.id> di akses 5 Desember 2017)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam pelaksanaan program KUR oleh Bank BRI Capem dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

#### **A. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan masih diperlukan pengelolaan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum digunakan. Data primer diperoleh ketika melakukan penelitian dari orang-orang atau informan berupa wawancara secara langsung termasuk observasi.

#### **B. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan tidak diperlukan pengelolaan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen- dokumen, arsip, jurnal maupun artikel terkait yang dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data juga membantu peneliti dalam memperoleh data yang berkualitas dan memenuhi standar di lapangan. Tanpa mengetahui teknik penelitian data maka peneliti tidak akan memperoleh data yang di inginkan dan memenuhi standar dan yang ditetapkan.

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis turun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data maka peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan peristiwa secara langsung yang terjadi dilapangan termasuk mendengar, pencatatan dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial berupa perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, dan benda-benda tertentu selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diamati. Observasi digunakan peneliti untuk mengetahui dan mengamati secara langsung mengenai Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha oleh Bank BRI melalui Kredit KUR.
2. Wawancara, Wawancara atau interview adalah proses memperoleh atau mengetahui jawaban maupun keterangan dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung atau tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan responden/narasumber atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.
3. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data sekunder berupa foto- foto, dokumen, catatan, keterangan atau data lainnya yang berhubungan dan dapat memberi dukungan ataupun memperkuat hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

### Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang oleh peneliti dianggap menguasai, memahami, dan tau tentang objek penelitian, yang dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kecamatan : 1 Orang
2. Karyawan Bank BRI : 2 Orang

3. Pelaku usaha rumah makan : 4 Orang
4. Pelanggan rumah makan : 3 Orang

### Teknik Analisis Data

Menurut Sugyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara catatan lapangan, dan sfudi dokumentasi dengan cara mengotanisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi (Miles dan Huberman, 1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.
- b. Tahap Penyajian Data (Display. Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneiiti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.
- c. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Pengambilan kesimpulan juga merupakan

analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data di hentikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **a. Ketepatan Sasaran**

Sasaran program KUR yang ditetapkan pemerintah adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui penyediaan modal usaha oleh pemerintah yang disalurkan melalui Bank BRI. Para pelaku usaha yang mempunyai usaha tetap serta memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pihak pelaksana program yaitu Bank BRI menjadi sasaran dari program tersebut seperti pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Kawangkoan. Hal ini turut dibenarkan oleh pemerintah kecamatan Kawangkoan / Camat dikatakan bahwa penyaluran dana KUR di Kecamatan Kawangkoan sudah tepat sasaran.

#### **b. Ketepatan Waktu Penyaluran KUR**

Mengenai ketepatan waktu penyaluran KUR diakui oleh salah seorang karyawan yang menangani perkreditan bahwa masih mengalami keterlambatan disebabkan beberapa kendala teknis berupa kelengkapan berkas pemohon yang belum siap sehingga harus menunggu beberapa waktu lamanya baru dapat diproses karena selama ini banyak pelaku usaha yang belum mengurus perijinan usaha dan hal tersebut sangat mengganggu proses penyaluran KUR sehingga tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.

#### **c. Ketepatan Jumlah Uang Yang Diterima**

Besaran jumlah uang yang diterima oleh pihak perkreditan KUR dari Bank BRI banyak dikeluhkan karena hamper semua kreditur yang mengajukan permohonan pinjaman melalui program KUR tidak mendapat persetujuan sesuai yang mereka ajukan seperti contoh pengajuan mereka sesuai kebutuhan adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tapi yang dicairkan hanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bahkan ada yang hanya mendapatkan lima juta rupiah dengan berbagai alasan untuk itu mereka meminta kepada pemerintah untuk mempermudah persyaratan agar mereka bisa mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan usaha mereka.

#### **d. Ketepatan beban Kredit**

Penetapan angsuran pinjaman yang terlalu tinggi dapat membebani kreditur dalam mengembalikan pinjaman hal ini disampaikan oleh para nasabah yang merasa terbebani dengan angsuran yang tinggi sementara penghasilan dari usaha yang mereka lakukan tidak menutupi angsuran, hal ini disebabkan karena merebaknya kasus virus Covid-19 yang melumpuhkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat termasuk kegiatan rumah makan yang terpaksa ditutup karena sepi pengunjung serta ada himbauan pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah. Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin menurun, pemerintah mengambil langkah melakukan relaksasi pinjaman terutama pada Bank milik pemerintah namun hal tersebut bukannya menyelesaikan masalah akan tetapi justru menambah beban nasabah atau kreditur karena pada pembayaran berikutnya angsuran naik hingga mencapai 30% hal tersebut banyak dikeluhkan masyarakat terutama para kreditur KUR Bank BRI.

#### **e. Ketepatan prosedur**

Untuk bisa mendapatkan pinjaman atau kredit KUR setiap pemohon atau kreditur diminta untuk mengikuti prosedur atau

tahapan – tahapan pemberian kredit yang sudah ditetapkan pemerintah namun hal ini sering dilanggar atau tidak dilakukan oleh karyawan Bank BRI fakta dilapangan menunjukkan bahwa penetapan seseorang untuk mendapatkan kredit tidak didasarkan pada prosedur akan tetapi lebih pada factor kedekatan atau kenalan sehingga ada kesan timbang pilih sehingga proses yang semestinya dilalui mulai dari persiapan, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan administrasi kredit serta supervise kredit sudah tidak dilaksanakan sesuai prosedur tapi langsung ditetapkan.

### **Pembahasan**

Berikut ini akan dibahas beberapa aspek yang menjadi focus penelitian sehubungan dengan objek yang diteliti yaitu :

#### **a. Ketepatan Sasaran**

Menurut Hasibuan (2014:100) ketepatan sasaran mengarah kepada pengertian kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang telah ditentukan. Ketepatan sasaran adalah keberhasilan dari tujuan pelaksanaan yang ingin dicapai / tercapainya realisasi kredit yang telah ditentukan oleh Bank pelaksana. Ketepatan sasaran yang diharapkan pihak Bank adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat tepat guna (efektif). KUR bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam penyediaan modal usaha penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebab ditemukan beberapa nasabah yang menggunakan dana kredit untuk kebutuhan konsumtif. Namun sesuai hasil wawancara penulis dengan para nasabah KUR paling banyak mengatakan bahwa kredit yang kami dapat benar – benar digunakan untuk modal kerja guna mengembangkan usaha sehingga dapat memberikan manfaat, mampu meningkatkan volume penjualan usahanya.

#### **b. Ketepatan Waktu Penyaluran KUR**

Penetapan waktu penyaluran KUR merupakan sesuatu hal yang sangat krusial yang selalu dinanti – nantikan oleh para nasabah baik itu penetapan waktu dimulainya tahapan penyaluran sampai pada tahapan pencairan dana itu semua harus dilakukan secara tepat, kalau tidak maka akan menimbulkan gejala dikalangan para nasabah karena ketidak pastian. Dalam wawancara peneliti dengan beberapa nasabah atau kreditur KUR diketahui bahwa penyaluran KUR pada Bank BRI tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah karena tidak melalui sosialisasi terlebih dahulu sehingga terkesan prosesnya dilakukan secara sembunyi – sembunyi. Jadi mereka yang mereka yang sudah mendapat informasi awal mengenai penyaluran dana KUR itu yang lebih dahulu mendapatkannya sementara masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut tidak dapat memanfaatkan program KUR dengan alasan terlambat mengajukan permohonan sementara batas waktu yang ditetapkan sudah habis. Hal tersebut banyak dikeluhkan masyarakat karena pihak BRI tidak transparan dalam proses penyaluran KUR menjadikan program pemerintah tidak terlaksana secara efektif. Itu berarti diperlukan evaluasi kembali oleh pihak pemerintah terhadap efektivitas penyaluran dana KUR oleh Bank BRI.

#### **c. Ketepatan Jumlah Uang Yang Diterima**

Yaitu ketepatan jumlah kredit yang akan di terima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang diajukan sebelumnya oleh para nasabah sesuai kebutuhan usaha mereka. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap

hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon (Kasmir, 2012:144) dan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh fakta bahwa banyak nasabah yang mengeluh karena kredit yang dicairkan tidak sesuai dengan jumlah yang mereka ajukan.

d. Ketepatan beban Kredit

Yaitu ketentuan yang disepakati oleh debitur terhadap kreditur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebanan kredit. Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank sesuai dengan kesepakatan (kasmir, 2012 : 154). Penetapan beban kredit oleh pihak bank kepada nasabah sebagai kreditur menurut para informan yang penulis wawancarai dirasa sangat membebani para nasabah sebab jumlah penghasilan yang diperoleh dari usaha rumah makan tidak mampu menutupi setoran setiap bulan tidak mampu menutupi setoran setiap bulan apalagi dimasa pandemic covid 19 seperti sekarang ini.

e. Ketepatan prosedur

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Tahapan dalam prosedur pemberian kredit pada setiap bank pada umumnya tidaklah jauh berbeda, dimana setiap permohonan kredit dari calon debitur haruslah wajib dilakukan analisisnya untuk mendapat persetujuan kreditnya. Menurut Firdars & Ariyanti (2019: 91-133), tahapan proses atau prosedur: pemberian kredit yaitu:

a. Persiapan Kredit (*Credit Preparation*)

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank,

biasanya dilakukan melalui tanya jawab/wawancara atau cara lainnya.

b. Analisis atau Penilaian Kredit (*Credit Analysis*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Untuk selanjutnya pihak bank akan menganalisa kelayakan usaha sebelum putusan kredit diberikan.

c. Keputusan Kredit (*Credit Decision*)

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak, apabila dikatakan layak maka dituangkan dalam surat keputusan kredit.

d. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit (*Credit Realization & Credit Administration*)

Pada tahap ini kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran – lampirannya.

e. Supervisi Kredit (*Credit Supervision / Follow up*)

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan dengan jalan memantau jalannya usaha (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/atau nasehat dan konsultasi kepada pelaku usaha.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek ketepatan sasaran

Sasaran program KUR adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui penyediaan modal usaha oleh pemerintah yang disalurkan melalui Bank BRI. Para pelaku usaha rumah makan/rumah kopi di kecamatan Kawangkoan menjadi sasaran dalam program tersebut dan pelaksanaannya

dilakukan secara professional dengan seleksi ketat sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan yang diwawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan program KUR di Kecamatan Kawangkoan sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku serta tepat sasaran.

2. Aspek ketepatan waktu

Dari aspek ketepatan waktu penyaluran KUR, diakui oleh pegawai BRI bahwa memang terkadang masih mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena banyak para pelaku usaha rumah makan belum mengurus administrasi perusahaan sehingga pihak Bank harus menunggu kelengkapan berkas yang disiapkan oleh para kreditur, kalau sudah lengkap barulah kredit tersebut dapat diproses.

3. Aspek ketepatan jumlah uang yang diterima

Dana KUR yang diterima oleh kreditur melalui bank BRI dapat dikatakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan para pelaku usaha rumah makan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan kredit yang diajukan sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun yang disetujui hanya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) bahkan ada yang hanya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh petugas Bank BRI. Hal tersebut banyak dikeluhkan oleh para debitur karena mereka merasa bahwa apa yang mereka terima tidak sesuai dengan kebutuhan usaha yang mereka lakukan.

4. Aspek ketepatan beban kredit

Penetapan angsuran yang tinggi oleh Bank BRI menjadi keluhan para kreditur karena mereka merasa terbebani apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini banyak usaha yang berhenti beroperasi atau tutup sehingga para pelaku usaha termasuk rumah makan yang ada di Kecamatan Kawangkoan kehilangan penghasilan. Jadi para kreditur merasa terbebani dalam

membayar angsuran atau cicilan pinjaman di Bank BRI.

5. Aspek ketepatan prosedur

Prosedur pemberian kredit KUR yang dilakukan oleh Bank BRI dimaksudkan untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit yaitu mulai dari persiapan kredit (credit preparation), analisis atau penilaian kredit (credit analysis), keputusan kredit (credit decision) sampai pada pelaksanaan dan administrasi kredit (credit supervision/follow up). Hal ini menurut para informan tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada atau dengan kata lain ada prosedur tertentu yang dilewati sehingga kreditur yang semestinya tidak layak mendapatkan kredit KUR tersebut tapi kenyataannya mereka menerima.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Bank BRI sebagai pelaksana program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, disarankan agar bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat dengan mengikuti berbagai peraturan pelaksanaan KUR serta melakukan seleksi yang ketat terhadap para pemohon kredit sehingga program KUR yang dilaksanakan oleh Bank BRI dapat tepat sasaran.
2. Juga kepada Bank BRI disarankan agar pelaksanaan program KUR dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan membantu mempermudah para kreditur dalam pengurusan administrasi kredit yang menjadi persyaratan dalam mendapatkan kredit KUR.
3. Pemberian KUR kepada para pelaku usaha oleh Bank BRI disarankan untuk diberikan sesuai kebutuhan para pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan atau mengelola usaha secara maksimal dengan adanya

- kecukupan modal usaha yang mereka dapatkan.
4. Dalam penetapan beban kredit kepada pihak kreditur diharapkan agar pihak Bank dapat mempertimbangkan aspek kemampuan kreditur dalam pembayaran angsuran serta memperhatikan kondisi usaha yang sementara atau sedang dijalankan dan juga kondisi eksternal lainnya seperti adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha masyarakat.
  5. Kepada pihak Bank BRI juga disarankan agar dalam penyaluran KUR harus mengikuti prosedur yang ditetapkan agar tidak terjadi hal – hal yang dapat merugikan pihak kreditur yang mengajukan permohonan kredit kepada Bank BRI. Dan seluruh kreditur harus mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoeparto. 2002. Menuju SDM Berdaya dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. PT. Elex Media Komputindo Jakarta.
- Brayen Bakulu ,Masje Pangkey dan Helly Kolondam. 2021. Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik* Vol 7, No 101 (2021)
- Firdaus, R. & Ariyanti, M (2009), *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Ayobami Folarin (2012). Impacts of External Business Environment on Organisational Performance in the Food and Beverage Industry in Nigeria. *British Journal of Arts and Social Sciences* ISSN: 2046-9578.
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Group
- Kania Suryaningrum Masje Pangkey Burhanuddin Kiyai. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Suatu Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil. Dan Menengah Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik* Vol 2, No 30 (2015)
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lestari, R. P., & Murti, I. (2015). Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri)(Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. *Jpap: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01).
- Marimbo, Rizal, 2008. *Ayo ke Bank Dapatkan Kredit UMKM*, Jakarta: PT Gramedia
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah